



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**NOMOR : 63 /Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu menyusun dan menetapkan Pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/walikota berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898), maka perlu menetapkan Pedoman Teknis tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara;
  - c. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1354);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1356);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 18/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 54/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 Tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor : 9/Kpts/KPU-Kab-012.329402/TAHUN 2016 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017;
  3. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 15 September 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017.

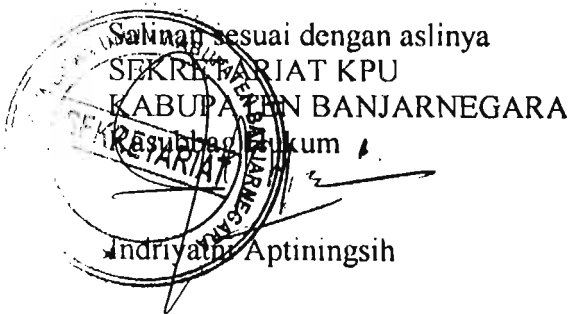
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 15 September 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANJARNEGARA

td

GUGUS RISDARYANTO



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANJARNEGARA  
NOMOR 3./Kpts/KPU.Kab-012.329402/TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN  
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

**PEDOMAN TEKNIS  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3), Pasal 88 ayat (2), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara perlu menetapkan Keputusan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017.

Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banjarnegara, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Se-Kabupaten Banjarnegara dalam menyelenggarakan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan.

Ditetapkannya keputusan tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara Tahun 2017 ini dengan tujuan antara lain:

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara Pemilihan agar bisa menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya dengan baik;
2. Untuk menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilihan khususnya KPPS dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
3. Untuk menjadi pedoman bagi para pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan;

**B. PENGERTIAN...**

## B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Banjarnegara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Banjarnegara untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa /kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.

10. Badan...

10. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Banjarnegara, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten Banjarnegara yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan.
14. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di Desa /Kelurahan.
15. Pengawas Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut Pengawas TPS, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan untuk membantu PPL.
16. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
19. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi

oleh...

- oleh KPU Provinsi Jawa Tengah atau KPU Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
  21. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.
  22. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
  23. Saksi Pasangan Calon, selanjutnya disebut Saksi, adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
  24. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
  25. Daftar Pemilih Tetap, selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Banjarnegara.
  26. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
  27. Daftar Pemilih Pindahan, selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
  28. Hari adalah hari kalender.
  29. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.

### **C. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMILIHAN**

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara harus berpedoman pada prinsip-prinsip yaitu :

1. Mandiri
2. Jujur

3. Adil...

3. Adil
4. Kepastian Hukum
5. Tertib
6. Kepentingan Umum
7. Keterbukaan
8. Proporsionalitas
9. Profesionalitas
10. Akuntabilitas
11. Efisiensi
12. Efektifitas dan
13. Aksesibilitas

#### **D. DASAR HUKUM**

Dalam penyusunan keputusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat...

- Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
  10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
  13. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
  15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat...

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1390);
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1356);
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN DAN FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA**

#### **A. PELAKSANAAN**

1. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU
2. Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
3. Pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

4. KPU...

4. KPU Kabupaten menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan Keputusan KPU Kabupaten
5. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada angka 4 disampaikan kepada Bupati untuk menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
6. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPS.
7. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 6, dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS.

## **B. FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA**

1. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
  - a. Model C-KWK sebagai Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - b. Model C1-KWK berhologram sebagai Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS;
  - c. lampiran Model C1-KWK berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara sah;
  - d. Model C1-KWK Plano berhologram merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS;
  - e. Model C2-KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
  - f. Model C3-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
  - g. Model C4-KWK merupakan surat pengantar penyampaian berita acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dari KPPS kepada PPS
  - h. Model C5-KWK merupakan tanda terima penyampaian Berita Acara Pemungutan dan Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS kepada Saksi dan PPL
  - i. Model C6-KWK merupakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
  - j. Model C7-KWK merupakan Daftar Hadir Pemilih di TPS;
  - k. Model A.3-KWK merupakan Daftar Pemilih Tetap;
  - l. Model A.4-KWK merupakan Daftar Pemilih Pindahan
  - m. Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;

n. Model...

- n. Model A.Tb-KWK untuk mencatat nama-nama pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih.
2. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

### **BAB III PEMILIH**

1. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, adalah:
  - a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
  - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4- KWK).
  - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari Pemungutan Suara dan didaftarkan dalam Model A.Tb-KWK.
2. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
3. Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2, pemilih menunjukkan formulir Model C6- KWK.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.
5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4 meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari dan tanggal Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
  - d. tugas belajar;
  - e. tertimpa bencana alam
  - f. Pindah Domisili dan
  - g. tertimpa bencana alam
6. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A5- KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara

7. Dalam hal...

7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kabupaten Banjarnegara untuk mendapatkan formulir Model A5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum Pemungutan Suara.
8. PPS atau KPU Kabupaten meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud angka 6 dan 7 pada DPT.
9. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kabupaten menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kabupaten.
10. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
11. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 6, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A5-KWK dari PPS asal atau KPU Kabupaten, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
12. KPU Kabupaten atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dicatat oleh anggota KPPS keempat atau KPPS kelima pada salinan DPPh (Model A4-KWK) dengan cara menambahkan nama Pemilih pada nomor urut berikutnya dalam salinan DPPh tersebut.
14. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 11 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 s waktu setempat.
15. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
  - a. menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara;
  - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
16. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.

17. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 15, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
18. Dalam hal Pemilih tidak membawa formulir Model C6- KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3, Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan:
  - a. Tidak menggabungkan desa/kelurahan;
  - b. Memudahkan Pemilih;
  - c. Hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
  - d. Jarak dan Waktu tempuh menuju TPS
21. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud angka 20, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama.

#### **BAB IV**

### **PEMUNGUTAN SUARA**

#### **A. KEGIATAN PERSIAPAN**

1. Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara
  - a. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara
  - b. Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud huruf a dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa atau /kelurahan yang bersangkutan.
  - c. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
  - d. Dalam formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud huruf c, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
  - e. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud huruf c.
  - f. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C6- KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.

g. Apabila...

- g. Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara, terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C6-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- h. Dalam hal formulir Model C6-KWK yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- i. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- j. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud huruf i, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Ketua KPPS memberikan formulir Model C6-KWK kepada Pemilih.
- k. Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT belum menerima formulir Model C6-KWK, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- l. Anggota KPPS keempat atau Anggota KPPS kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf k pada DPT, dan mencocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
- m. Apabila dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf l, nama Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya.
- n. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara terdapat formulir Model C6-KWK yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS.
- o. PPS menerima pengembalian formulir Model C6-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf n menggunakan Berita Acara Model D.1-KWK.
- p. Penyusunan Berita Acara Pengembalian Formulir C6-KWK oleh PPS dapat dibantu oleh KPPS.

q. Berita...

- q. Berita Acara pengembalian Formulir Model C6-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf o dibuat dalam 2 rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS.
- r. PPS melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir model C6-KWK dengan menggunakan Formulir Model D2-KWK.
- s. PPS menyerahkan Berita Acara Model D1-KWK dan Model D2-KWK sebagaimana dimaksud pada huruf o kepada PPK bersama-sama hasil penghitungan suara di TPS untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten.
- t. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi terhadap seluruh Berita Acara pengembalian formulir Model C6-KWK dengan menggunakan formulir Model DB.8-KWK.

## 2. Penyiapan TPS

- a. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- b. TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- c. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- d. Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.
- e. TPS sebagaimana dimaksud huruf a dibuat dengan ukuran paling kurang panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- f. TPS sebagaimana dimaksud huruf e diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
- g. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud huruf e harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
- h. TPS sebagaimana dimaksud huruf e dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
  - 1) apabila di ruang terbuka, tempat duduk Ketua KPPS dan Anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara;

2. apabila...

- 2) apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan kedudukan Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- i. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf h angka 2), dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
- j. TPS sebagaimana dimaksud huruf e dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
  - 1) ruangan atau tenda;
  - 2) alat pembatas;
  - 3) papan pengumuman untuk menempel daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon, salinan DPT;
  - 4) papan atau tempat untuk menempel formulir Model C1-KWK dan lampirannya;
  - 5) tempat duduk dan meja Ketua dan Anggota KPPS;
  - 6) meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara;
  - 7) tempat duduk Pemilih, Saksi, PPL/Pengawas TPS dan Pemantau Pemilihan; dan
  - 8) alat penerangan yang cukup.
- k. TPS sebagaimana dimaksud huruf e sampai dengan huruf j dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- l. Pembuatan TPS di tempat-tempat sebagaimana dimaksud huruf k, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- m. TPS sebagaimana dimaksud huruf k dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
- n. TPS harus bebas dari atribut Pasangan Calon atau Partai Politik dalam radius 200 meter .
- o. KPPS menyiapkan dan mengatur:
  - 1) tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
  - 2) meja dan tempat duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS Kedua dan Anggota KPPS Ketiga;
  - 3) meja dan tempat duduk Anggota KPPS Keempat dan KPPS kelima, di dekat pintu masuk TPS;

4) tempat...

- 4) tempat duduk Anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
  - 5) tempat duduk Anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
  - 6) tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
  - 7) meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
  - 8) meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, termasuk Pemilih yang menggunakan kursi roda;
  - 9) bilik suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik suara dengan batas lebar TPS paling kurang 1 (satu) meter;
  - 10) meja tempat bilik suara, perlu mempunyai kolong yang cukup sehingga Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
  - 11) papan sebanyak 2 (dua) buah yang pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
    - a) salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi, dan program serta biodata singkat Pasangan Calon; dan
    - b) Salinan DPT
  - 12) papan sebagaimana dimaksud pada angka 11) pada saat Penghitungan Suara digunakan untuk memasang sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
  - 13) papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
  - 14) tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS
- p. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf o kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk Ketua KPPS dan masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
3. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
    - a. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, serta dukungan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
    - b. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas:
      - 1) kotak suara;

2) Surat Suara...

- 2) Surat Suara;
  - 3) tinta;
  - 4) bilik Pemungutan Suara;
  - 5) segel;
  - 6) alat untuk memberi tanda pilihan; dan
  - 7) TPS
- c. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas:
- 1) sampul kertas;
  - 2) tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi;
  - 3) karet pengikat Surat Suara;
  - 4) lem/perekat;
  - 5) kantong plastik;
  - 6) ballpoint;
  - 7) gembok;
  - 8) spidol;
  - 9) formulir dan sertifikat;
  - 10) stiker nomor kotak suara;
  - 11) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
  - 12) alat bantu tuna netra; dan
  - 13) daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon; dan
  - 14) Salinan DPT
- d. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara ,dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- e. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
- f. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1), angka 2), angka 3), angka 5) dan angka 6) serta dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf c, angka 1), angka 3), angka 5), angka 9), angka 11), dan angka 12) dimasukkan dalam kotak suara.
- g. Formulir dan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf c. Angka 9) yang dimasukkan ke dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan untuk formulir Model C7-KWK.
- h. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf b terdiri atas:

1) Surat...

- 1) Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan Surat Suara Cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS;
  - 2) tinta paling banyak 2 (dua) botol;
  - 3) sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
  - 4) segel sebanyak 19 (sembil belas) buah;
  - 5) kotak suara sebanyak 1 (satu) buah ;
  - 6) bilik suara paling sedikit 2 (dua) buah;
  - 7) alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap bilik Pemungutan Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
- i. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud huruf h angka 1) menghasilkan angka pecahan, maka hitungannya dibulatkan ke atas.
  - j. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 1), terdiri atas:
    - 1) sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten Banjarnegara kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
    - 2) Sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS
  - k. Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 1) terdiri dari :
    - 1) sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan;
    - 2) sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
      - a) Surat Suara sah;
      - b) Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
      - c) Surat Suara yang tidak sah;
      - d) Surat Suara yang tidak digunakan;
      - e) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
      - f) Salinan daftar Pemilih dalam formulir Model A.3-KWK, Model A.4-KWK dan Model A.Tb-KWK
      - g) kunci gembok yang digunakan untuk mengunci kotak suara.

I. Penggunaan...

- l. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud huruf i ditentukan sebagai berikut:
  - 1) sampul kertas sebagaimana dimaksud pada pada huruf j angka 1) setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS;
  - 2) sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPPS, disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- m. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud huruf l angka 2) yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf k angka 2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
- n. Segel sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf b angka 5), digunakan untuk menyegel :
  - 1) masing-masing sampul yang memuat:
    - a) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran Model C1-KWK berhologram, serta salinan Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran Model C1-KWK;
    - b) Surat Suara sah;
    - c) Surat Suara yang rusak dan/atau keliru diberi tanda coblos;
    - d) Surat Suara tidak sah;
    - e) Surat Suara tidakdigunakan; dan
    - f) tempat kunci gembok kotak suara yang dapat memuat tulisan nomor TPS dan nama PPS;
  - 2) lubang kotak suara; dan
  - 3) gembok kotak suara.
- o. Jumlah segel sebagaimana dimaksud huruf n ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
- p. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c meliputi:
  - 1) tanda pengenal digunakan untuk :
    - a) KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
    - b) Saksi sebanyak diperlukan; dan
    - c) Petugas yang menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan TPS.
  - 2) karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk mengikat Surat Suara;
  - 3) lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
  - 4) kantong...

- 4) kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
  - 5) ballpoint sebanyak 5 (lima) buah;
  - 6) gembok dan kuncinya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
  - 7) spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model CI-KWK Plano dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah.
  - 8) tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) roll untuk setiap TPS.
- q. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 13 berupa salinan daftar Pasangan Calon, visi, misi dan biodata Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- r. Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana huruf c angka 14 berupa salinan DPT tiap TPS, digunakan untuk:
- 1) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - 2) bahan KPPS untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
  - 3) disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
  - 4) disampaikan kepada PPL/Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.

#### 4. Pembagian Tugas KPPS

- a. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada Anggota KPPS mengenai:
  - 1) tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
  - 2) pembagian tugas Anggota KPPS.
- b. Penjelasan sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- c. Pembagian tugas Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) sebagai berikut:
  - 1) Ketua KPPS sebagai Anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
  - 2) Anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta lampirannya dan memisahkan surat pemberitahuan

berdasarkan...

berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;

- 3) Anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
  - a) memeriksa kesesuaian antara nama Pemilih dalam formulir Model C6-KWK dengan nama Pemilih yang tercantum dalam salinan DPT, formulir Model A.5-KWK dengan salinan DPPh, dan memberi tanda pada kolom nomor urut Pemilih dalam salinan DPT, DPTb atau DPPh;
  - b) meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak membawa formulir Model C6-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam Daftar Pemilih;
  - c) dalam hal terdapat kekurangan terhadap formulir Model C6-KWK yang diserahkan oleh Pemilih, anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meminta Pemilih dimaksud menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
  - d) anggota KPPS Keempat atau anggota KPPS Kelima meneliti Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf b) dalam Daftar Pemilih;
  - e) memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atau Identitas Lain bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
  - f) menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada formulir Model C6-KWK dan formulir Model A.5-KWK dan mencatat nama Pemilih dalam daftar hadir dengan menggunakan formulir Model C7-KWK;
  - g) memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;
  - h) mencatat identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf c yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model A.Tb-KWK.
  - i) Memeriksa dan mencocokkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 angka 16 dan angka 17, tidak terdaftar dalam DPT;
  - j) Mencatat...

- j) Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C7-KWK dengan berpedoman pada salinan DPT atau DPTb atau DPPh; dan
  - k) Dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud huruf j), petugas melengkapi pada kolom keterangan daftar hadir formulir Model C7-KWK.
- 4) Anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
  - 5) Anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya;
- d. Dalam hal Ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, Anggota KPPS memilih salah satu Anggota KPPS sebagai Ketua KPPS.
  - e. Dalam hal terdapat Anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, sehingga jumlah Anggota KPPS kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas masing-masing Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.
  - f. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS
  - g. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud huruf f, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
  - h. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada PPK
  - i. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud huruf h kepada KPU Kabupaten.
  - j. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud huruf i kepada Bupati.
  - k. KPU Kabupaten menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan keputusan PPS.

## B KEGIATAN PELAKSANAAN...

## B. KEGIATAN PELAKSANAAN

### 1. Kegiatan Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, dan Saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT dan daftar Pasangan Calon pada papan pengumuman;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
- f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS.

### 2. Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

- a. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- b. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf A angka 3.
- c. Saksi yang hadir pada rapat Pemungutan Suara dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto Pasangan Calon dan simbol/gambar Partai Politik dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Pasangan Calon/Tim Kampanye.
- d. Jumlah saksi sebagaimana dimaksud huruf c paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
- e. Saksi sebagaimana dimaksud pada huruf d yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
- f. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud huruf b Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- g. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada huruf f Saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- h. Saksi yang hadir berhak menerima:
  - 1) salinan DPT;
  - 2) salinan Berita Acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.
- i. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:

l) pengucapan...

- 1) pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
  - 2) pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
  - 3) penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- j. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf i, Ketua KPPS:
- 1) memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS;
  - 2) membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara meliputi:
    - a) membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, serta memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
    - b) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
    - c) memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
    - d) menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT serta menandatangani Surat Suara yang akan digunakan.
  - 3) memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi mengenai:
    - a) jumlah Surat Suara yang diterima;
    - b) tata cara pemberian suara;
    - c) tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih;
    - d) tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan.
  - 4) memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf b) secara berulang ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara
- k. Ketua KPPS memastikan Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf c dan huruf g.

- l. Kegiatan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c angka 1) dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan Petugas ketertiban TPS serta disaksikan oleh Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat dan/ atau Pemilih.
- m. Sumpah atau janji Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud huruf j angka 1), berbunyi sebagai berikut:  
*" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:  
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banjarnegara, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan".*
- n. Penjelasan Ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud huruf j angka 3) huruf b) meliputi:
  - 1) format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
  - 2) Pemilih memberikan suara di bilik suara;
  - 3) tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
  - 4) dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih apat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS, dan hanya berlaku untuk 1 (satu) kali penggantian;
  - 5) pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
  - 6) Pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPH, dan DPTb;
  - 7) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
  - 8) Kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
  - 9) Larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

o. Tata cara...

- o. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf n angka 3) ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) memastikan surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - 2) pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - 3) menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku;
  - 4) pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
3. Apabila Pasangan Calon Berhalangan Tetap
  - a. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap :
    - 1) KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
    - 2) Ketua KPPS mengumumkan melalui Papan Pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
  - b. Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
4. Apabila Pasangan Calon Meninggal Dunia

Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon meninggal dunia dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari Pemungutan Suara, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon Perseorangan tidak mengusulkan calon pengganti, salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak meninggal dunia ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan :

  - a. KPU Kabupaten wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
  - b. Ketua KPPS mengumumkan melalui Papan Pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
5. Pemberian Suara
  - a. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf n dan o, Ketua KPPS:
    - 1) menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
    - 2) memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih
    - 3) memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka.
    - 4) Mengingatkan l...

- 4) Mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
- b. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
  - c. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3), Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak.
  - d. Apabila pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada Ketua KPPS.
  - e. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf d, hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
  - f. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud pada Bab III angka 1 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
  - g. Anggota KPPS Keempat atau Kelima melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana pada huruf f, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
  - h. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf f, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
  - i. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud huruf h, apabila Surat Suara masih tersedia.
  - j. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud huruf h telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
  - k. Pemilih yang telah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3), melakukan kegiatan :
    - 1) menuju bilik suara;
    - 2) membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
    - 3) mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud pada angka 2 angka 3) huruf b);

4) melipat...

- 4) melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
  - 5) memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara;
  - 6) mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
- l. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud pada huruf k.
  - m. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf k berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
  - n. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud huruf m, dapat dibantu oleh pendamping
  - o. Pendamping sebagaimana dimaksud huruf n, dapat berasal dari Anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
  - p. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada huruf m, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
  - q. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf m, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
    - 1) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
    - 2) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua beah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota KPPS.
  - r. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud huruf q angka 1) dan 2) wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C3-KWK.
  - s. Pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
  - t. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud huruf s, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat Penghitungan Suara di TPS.

## BAB V...

## BAB V PENGHITUNGAN SUARA

### A. KEGIATAN PERSIAPAN

1. Penyiapan Sarana dan Prasarana
  - a. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
  - b. Sebelum rapat Penghitungan Suara di TPS, Anggota KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam Penghitungan Suara.
  - c. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
    - 1) pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
    - 2) tempat duduk Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
    - 3) alat keperluan administrasi;
    - 4) formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
    - 5) sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
    - 6) segel;
    - 7) kotak suara yang ditempatkan di dekat meja Ketua KPPS serta menyiapkan kuncinya; dan
    - 8) peralatan TPS lainnya.
  - d. Penempatan Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau, dan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf c angka 2, diatur sebagai berikut:
    - 1) Saksi dan PPL /Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS;
    - 2) Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
  - e. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf c diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas dan mudah digunakan.
2. Pencatatan Surat Suara
  - a. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, KPPS menuliskan di formulir sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, data sebagai berikut:
    - 1) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
    - 2) jumlah...

- 2) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPPh dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - 3) jumlah Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPTb dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - 4) jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan yang menggunakan hak pilihnya;
  - 5) jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
  - 6) jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
  - 7) jumlah Surat Suara yang tidak digunakan;
  - 8) jumlah surat suara yang digunakan.
- b. Jumlah Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara cadangan jumlahnya harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima oleh KPPS.
- c. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada huruf b diberi tanda silang pada bagian Surat Suara yang memuat tempat, nomor, alamat TPS dan tanda tangan Ketua KPPS dalam keadaan terlipat.
3. Pembagian Tugas
- a. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
    - 1) Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS Kedua bertugas:
      - a) memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
      - b) membuka Surat Suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir tentang perolehan suara.
    - 2) Anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram;
    - 3) Anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh Ketua KPPS;
    - 4) Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 25 (dua puluh lima) Surat Suara;
    - 5) Petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.

b. Apabila...

- b. Apabila jumlah Anggota KPPS sebagaimana dimaksud huruf a kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas Anggota KPPS ditetapkan oleh Ketua KPPS.

## B. PENGHITUNGAN SUARA

1. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 1, selesai dilakukan.
2. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
3. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara :
  - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja Ketua KPPS;
  - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
  - e. mencatat hasil Penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan formulir Model C1- KWK.
4. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada Ketua KPPS.
5. Ketua KPPS bertugas:
  - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, PPL/Pengawas TPS, Anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah;
  - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas .
6. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka, di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup serta dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
7. Saksi, PPL/Pengawas TPS, dan Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C1-KWK Plano berhologram.

8. Dokumentasi...

8. Dokumentasi sebagaimana dimaksud angka 7 dapat berupa foto atau video.
9. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang ditempel pada papan dengan cara *tally*, yaitu:
  - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
  - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (HH);
  - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Pasangan calon;
  - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
10. Ketua KPPS dibantu Anggota KPPS mengisi formulir Model C1-KWK dan lampiran berhologram, serta salinan Model C1-KWK dan lampiran, berdasarkan formulir Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 9.
11. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 10, Ketua KPPS melakukan pembetulan.
12. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 11, dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal.
13. Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka 12, dituliskan angka atau kata hasil pembetulan.
14. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 13.
15. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh Anggota KPPS.
16. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
  - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
  - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto, atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.
17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud angka 16 huruf b diatur sebagai berikut:
  - a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
  - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
  - c. tanda...

- c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
18. Setelah rapat Penghitungan Suara, Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Keenam dan Ketujuh menyusun/menghitung dan memisahkan:
    - a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas;
    - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
  19. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram dimasukkan ke dalam sampul dan disegel.
  20. Sampul yang berisi formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram sebagaimana dimaksud angka 19 dimasukkan ke dalam kotak suara sebagai bahan untuk rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK.
  21. Sampul yang berisi salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya untuk disampaikan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten Banjarnegara tidak dimasukkan ke dalam kotak suara.
  22. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 19 dan angka 21, ditandatangani oleh Ketua KPPS dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh Saksi yang hadir.
  23. Dalam hal Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud angka 22, cukup ditandatangani oleh Saksi yang bersedia menandatangani.
  24. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud angka 22 dan angka 23, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

#### **C. PENYELESAIAN KEBERATAN:**

1. Saksi dan PPL/Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan PPL/Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara formulir Model C1-KWK dan lampiran dengan Model C1-KWK Plano.
3. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi dan PPL/Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.

4. Pembentukan...

4. Pembedulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar
5. Ketua KPPS dan Saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembedulan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4.
6. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembedulan sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, KPPS meminta pendapat dan rekomendasi PPL/Pengawas TPS yang hadir.
7. KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi PPL/Pengawas TPS.
8. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C2- KWK dan ditandatangani oleh Ketua KPPS.
9. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada Model C2-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.
10. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C2-KWK.
11. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, PPL/Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi atau PPL/Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.

#### **D. PENGUMUMAN PERHITUNGAN SUARA**

1. KPPS mengumumkan salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya di lingkungan TPS yang mudah diakses oleh Publik selama 7 (tujuh) hari.
2. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan pada hari Pemungutan Suara.
3. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada PPK dan KPU Kabupaten pada hari Pemungutan Suara melalui PPS.
4. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya kepada Saksi, dan PPL/Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
5. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, salinan formulir Model C- KWK, Model C1-KWK dan lampirannya diserahkan kepada PPS untuk disampaikan kepada Saksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK untuk desa/kelurahan yang bersangkutan.

6. Saksi...

6. Saksi dan PPL/Pengawas TPS wajib memeriksa kebenaran angka yang tertera pada formulir Model C1- KWK dan lampirannya dengan mencocokkan pada formulir Model C1-KWK Plano berhologram.
7. Dalam hal KPPS tidak menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud angka 4 sampai batas waktu yang ditetapkan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- undangan.
8. KPU Kabupaten memindai (*scan*) salinan formulir Model C1-KWK dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada angka 3.
9. KPPS wajib menyegel, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara setelah rapat Penghitungan Suara di TPS.
10. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud angka 9 kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar, yang berisi:
  - a) formulir Model C-KWK, Model C1-KWK berhologram dan lampiran berhologram, serta Model C1-KWK Plano berhologram yang telah diisi;
  - b) salinan DPT (Model A3-KWK), DPPh (Model A4- KWK) dan DPTb (Model A.Tb-KWK);
  - c) formulir Model C2-KWK;
  - d) formulir Model C3-KWK;
  - e) formulir Model C5-KWK;
  - f) formulir Model C6-KWK;
  - g) formulir Model C7-KWK; dan
  - h) Surat Suara sah dan tidak sah, Surat Suara tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos.
11. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 diawasi oleh PPL/Pengawas TPS.
12. KPU Kabupaten mengirimkan hasil pemindaian formulir Model C-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 4, Model C1-KWK dan lampirannya kepada KPU untuk diumumkan di laman KPU.
13. Pengiriman hasil pemindaian formulir sebagaimana dimaksud angka 12 dapat menggunakan sarana teknologi informasi berdasarkan hasil kajian KPU.
14. Dalam hal formulir hasil pemindaian tidak dapat dikirim dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kabupaten dapat mengirimkan secara manual dengan menggunakan compact disk atau flashdisk.

15. KPU Kabupaten dapat melakukan tabulasi penghitungan suara sementara dengan berpedoman pada hasil kajian KPU sebagaimana dimaksud pada angka 13.
16. KPPS dilarang memberikan salinan Formulir Model C-KWK dan lampirannya kepada siapapun dan/ atau pihak manapun kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 8.

## **BAB VI**

### **PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

#### **A. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
  - e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil Penelitian dan Pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU Kabupaten Banjarnegara.

5. KPU Kabupaten memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rapat pleno KPU Kabupaten Banjarnegara.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Banjarnegara
7. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
9. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud angka 8, dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara Ulang di TPS.
12. KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan instansi/ lembaga/ perusahaan atau kepala satuan pendidikan untuk memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara Ulang.
13. Dalam Pemungutan Suara Ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data pemilih.
14. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
15. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud angka 14, meliputi :
  - a. Menjalankan tugas ditempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - d. Tugas belajar;
  - e. Pindah domisili; dan
  - f. Tertimpa bencana alam.
16. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 14, meminta formulir Model A5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS

yang...

yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.

17. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang di TPS, sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Kabupaten Banjarnegara.
18. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud angka 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Kabupaten.
19. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 17 dan angka 18, tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS, KPU Kabupaten menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.
20. KPU Kabupaten mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud angka 19.
21. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam sampul dalam keadaan tersegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
22. Sampul sebagaimana dimaksud angka 21 harus disegel dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
23. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.

## **B. PENGHITUNGAN SUARA ULANG**

1. Penghitungan Suara ulang meliputi:
  - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS;
  - b. penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
2. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
  - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
  - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
  - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
  - e. Saksi Pasangan Calon, PPL/Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
  - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
  - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud angka 2, Saksi, PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.

4. Dalam...

4. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saksi atau PPL/Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di PPK.
5. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau PPK harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara.
6. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.

### **C. PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Pemungutan Suara Ulang di TPS Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

- a. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten:
  - 1) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memperhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
  - 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
- b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, paling kurang menetapkan jadwal:
  - 1) pemberitahuan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
  - 2) penyampaian formulir Model C6.Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;
  - 3) pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Banjarnegara ;
  - 4) pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
  - 5) pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, dan KPU Kabupaten Banjarnegara;
  - 6) penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU;

c. Dalam...

- c. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf b kepada:
    - 1) KPU;
    - 2) KPU Provinsi;
    - 3) Mahkamah Konstitusi;
    - 4) Bawaslu Provinsi; dan/atau
    - 5) Panwas Kabupaten.
  - d. KPU Kabupaten dalam menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
  - e. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
  - f. KPU Kabupaten memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
  - g. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten Banjarnegara.
  - h. KPPS menyampaikan formulir Model C6.Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, dan DPTb paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara di TPS.
  - i. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
  - j. Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampiran yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dimasukkan ke dalam kotak suara.
  - k. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada huruf j, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.
- 2. Penghitungan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**
- a. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten :
    - 1) menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Kabupaten tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan

Mahkamah...

- Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi;
- 2) merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
- b. Keputusan KPU Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, paling kurang menetapkan jadwal:
- 1) pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;
  - 2) pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU Kabupaten;
  - 3) pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK dan KPU Kabupaten Banjarnegara
  - 4) pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, dan KPU Kabupaten Banjarnegara;
  - 5) penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi dan KPU .
- c. Dalam hal KPU Kabupaten melaksanakan Penghitungan Suara Ulang, KPU Kabupaten Banjarnegara menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud huruf a angka 1, kepada:
- 1) KPU;
  - 2) KPU Provinsi;
  - 3) Mahkamah Konstitusi;
  - 4) Bawaslu Provinsi; dan
  - 5) Panwas Kabupaten;
- d. KPU Kabupaten menyampaikan Keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud huruf c angka 1, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Kabupaten untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
- e. KPU Kabupaten mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten.

f. KPU...

- f. KPU Kabupaten menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Kabupaten
- g. Ketentuan tata cara pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

## **BAB VII**

### **PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN**

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
  - a. KPU Kabupaten Banjarnegara atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa atau sebutan lain/kelurahan;
  - b. KPU Kabupaten Banjarnegara atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan;
7. Pemungutan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan Suara.

8. Dalam...

8. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah Kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten.
9. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 8, KPU Kabupaten Banjarnegara menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN**

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau Puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau Puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau Puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud angka 1 menggunakan hak Pilihnya dengan menggunakan Formulir Model A5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. KPU Kabupaten Banjarnegara dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara;
  - b. KPU Kabupaten Banjarnegara menugaskan PPK/PPS untuk menyiapkan TPS yang akan melayani pemilih sebagaimana dimaksud diatas dengan mempertimbangkan jumlah pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara;
  - c. KPU Kabupaten Banjarnegara memberikan formulir Model A.5-KWK kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud angka 3 huruf b, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh PPL/ Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan pemungutan suara untuk melaksanakan Pemungutan Suara dengan cara

mendatangi...

- mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau Puskesmas, dengan ketentuan:
- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
  - b. petugas KPPS mencatat pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima model A.5-KWK dari pemilih;
  - c. Anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan;
  - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. KPU Kabupaten dapat membentuk TPS pada lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara, serta petugas atau karyawan lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara.
  6. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kejaksaan, 2 (dua) orang Anggota KPPS pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh ijin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, dan Kepala Kejaksaan.
  7. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
  8. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud angka 7, berupa template Surat Suara.
  9. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak dan untuk pemilih tambahan.
  10. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
  11. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud angka 9 dan angka 10 dicatat dalam berita acara.
  12. Ketentuan mengenai pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon berpedoman pada Peraturan KPU tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan KPU Kabupaten.
  13. Sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang

terdiri...

- terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
14. Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 13 dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. latar belakang foto pada kolom Pasangan Calon berwarna merah putih;
    - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
    - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
    - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
    - e. kolom kosong yang tidak bergambar.
  15. Ketentuan lebih lanjut tentang desain surat suara sebagaimana dimaksud pada angka 14 ditetapkan dengan Keputusan KPU.
  16. Pemberian suara Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada:
    - a. kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon; atau
    - b. kolom kosong yang tidak bergambar.
  17. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 16 diatur sebagai berikut:
    - a. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon, dinyatakan sah memberikan pilihan untuk Pasangan Calon; atau
    - b. tanda coblos pada kolom atau tepat pada garis kolom pilihan kolom kosong yang tidak bergambar, dinyatakan sah tidak memilih Pasangan Calon yang bersangkutan.
  18. Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 12 dinyatakan sah, apabila:
    - a. ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
    - b. diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto dan nama Pasangan Calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

1. Dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Pemilih dapat memilih dengan menggunakan Surat Keterangan paling lambat bulan Desember 2018.
2. Terhitung sejak bulan Januari 2019, syarat terdaftar sebagai Pemilih hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

## **BAB X...**

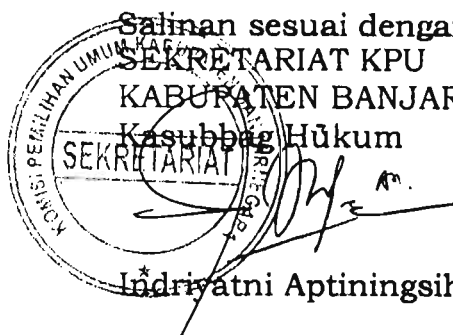
**BAB X**  
**PENUTUP**

Pedoman pemungutan dan penghitungan suara ini merupakan panduan bagi penyelenggara pemilihan pada semua tingkatan dan pihak terkait yang berkepentingan di berbagai tingkatan di seluruh Kabupaten Banjarnegara

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 15 September 2016

**KETUA**  
ttd  
**GUGUS RISDARYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
Kasubbag Hukum  
SEKRETARIAT  
Indriyatni Aptiningsih



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017

**JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANJARNEGARA TAHUN 2017**

1. MODEL C-KWK           : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
2. MODEL C1-KWK       : Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
3. LAMPIRAN MODEL C1-KWK   : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
4. MODEL C1-KWK PLANO       : Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. MODEL C2-KWK       : Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
6. MODEL C3-KWK       : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
7. MODEL C4-KWK       : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS.
8. MODEL C5-KWK       : Tanda Terima Penyampaian Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
9. MODEL C6-KWK       : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih
10. MODEL C7-KWK       : Daftar Hadir Pemilih di TPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



**BERITA ACARA  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2017**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun ..... Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, yang dihadiri oleh Saksi dan Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL)/Pengawas TPS, bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan\*) : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : BANJARNEGARA Provinsi : JAWA TENGAH

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT dan memberikan salinannya kepada Saksi dan PPL/Pengawas TPS yang hadir.
2. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
3. Membuka kotak suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara.
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memeriksa dan menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh pemilih.
6. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS.

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan suara dimulai pukul 13.00 waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT, DPPh, dan DPTb.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak digunakan.
3. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru coblos.
4. Menghitung dan mencatat sisa surat suara cadangan.
5. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan yang berisi surat suara sah dan surat suara tidak sah.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
.....	.....	.....	.....	.....	.....	.....

**SAKSI CALON**

1.	2.	3.
Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....	Nama Saksi:.....



**SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

**MODEL  
C1-KWK**

Logo Hologram

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten : BANJARNEGARA  
Provinsi : JAWA TENGAH

**I. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH**

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
A	<b>DATA PEMILIH</b>			
1.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)			
3.	Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) /pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan			
4.	Jumlah Pemilih (1+2+3)			
B	<b>PENGGUNA HAK PILIH</b>			
1.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
2.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)			
3.	Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)/pengguna KTP Elektronik atau Surat Keterangan			
4.	Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3)			

**II. DATA PENGGUNA SURAT SUARA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5% (2+3+4)	
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

**III. DATA JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Suara Sah Seluruh Calon	
2	Jumlah Suara Tidak Sah	
3	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (1 + 2)	

**IV. DATA DATA PEMILIH DISABILITAS/ PENYANDANG cacat (TIDAK BERPENGARUH PADA PENCATATAN DATA DIATAS)**

NO	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat			
2	Jumlah Pemilih disabilitas/penyanggah cacat yang menggunakan hak pilih			

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1	2	3	4	5	6	7
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**SAKSI CALON**

1	2	3
Nama Lengkap .....	Nama Lengkap .....	Nama Lengkap .....

\*) Coret yang tidak perlu



**RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

(diisi berdasarkan data Model C1-KWK Plano)

**LAMPIRAN  
MODEL C1-KWK**

Logo Hologram

TPS : ..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
 Kecamatan : ..... Kabupaten : BANJARNEGARA  
 Provinsi : JAWA TENGAH

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH		
1				
2				
3				
JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2)				
JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH				

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA**

1	2	3	4	5	6	7
Ketua	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota	Anggota

**SAKSI CALON**

1	2	3
Nama Lengkap .....	Nama Lengkap .....	Nama Lengkap .....

\*) Coret yang tidak perlu



**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2017**

MODEL C.1-  
KWK PLANO

Logo Hologram

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor .....

Desa/Kelurahan \*) .....

Kecamatan .....

Kabupaten/Kota \*) .....

Provinsi .....

NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	Rincian Perolehan Suara															Jumlah Tiap Baris	Jumlah				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1. NAMA PASANGAN CALON																					
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>																				
	2. NAMA PASANGAN CALON																				
		<i>(ditulis dengan huruf)</i>																			
		3. NAMA PASANGAN CALON																			
			<i>(ditulis dengan huruf)</i>																		
			JUMLAH SELURUH SUARA SAH CALON (1+2+3)																		
				<i>(ditulis dengan huruf)</i>																	
			SUARA TIDAK SAH																		
				<i>(ditulis dengan huruf)</i>																	
<i>(ditulis dengan huruf)</i>																					
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH			Jumlah Seluruh Suara Sah																		
	<i>(ditulis dengan huruf)</i>																				
	Jumlah Suara Tidak Sah																				
<i>(ditulis dengan huruf)</i>																					
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah																					
<i>(ditulis dengan huruf)</i>																					

**KELUARGA PENYELenggara PEMUNGUTAN SUARA**

No.	Jabatan	Nama Lengkap	Tanda Tangan
1	Ketua		1 .....
2	Anggota		2 .....
3	Anggota		3 .....
4	Anggota		4 .....
5	Anggota		5 .....
6	Anggota		6 .....
7	Anggota		7 .....

**SAKSI CALON**

No.	Nama Lengkap	CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Tanda Tangan
1		Nama Calon	1 .....
2		Nama Calon	2 .....
3		Nama Calon	3 .....



**CATATAN KEJADIAN KHUSUS  
DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor..... Desa/Kelurahan \*) : .....  
Kecamatan : ..... Kabupaten: BANJARNEGARA  
Provinsi : JAWA TENGAH

Kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan oleh Saksi sebagai berikut \*\*):

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... 2017

SAKSI YANG MENGAJUKAN  
KEBERATAN

KPPS,  
KETUA

\*) Coret yang tidak perlu

- Keterangan :**
- 1. Kejadian Khusus dicatat dan ditandatangani oleh Ketua KPPS;
  - 2. Apabila terdapat Keberatan Saksi, dicatat dan ditandatangani bersama oleh Saksi dan Ketua KPPS pada hari pemungutan suara.



## SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tanggal/Bulan/Tahun Lahir : .....  
A l a m a t : .....

### Atas permintaan pemilih

N a m a : .....  
Nomor Urut DPT /DPPH/DPTb \*) : ..... TPS : Nomor .....  
Desa/Kelurahan \*) : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

**Mengetahui**  
**Ketua Kelompok Penyelenggara**  
**Pemungutan Suara**

(.....)

.....  
**Yang Membuat Pernyataan**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu.



**SURAT PENGANTAR**

**Perihal:** Penyampaian Berita Acara  
Pemungutan Suara dan  
Penghitungan Suara di TPS.

**Kepada**  
**Yth. Ketua PPS .....**  
**Di -**  
.....

Bersama ini disampaikan dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/Kelurahan \*) : .....

Kecamatan : ..... Kabupaten : BANJARNEGARA

Provinsi : JAWA TENGAH

Dokumen dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

A.

1.	Model C-KWK	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
	Model C1-KWK Berhologram	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
	Lampiran Model C1-KWK Berhologram	Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Pasangan Calon.
2.	Model C1-KWK Plano Berhologram	Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS.
3.	Model C2-KWK	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
4.	Model C3-KWK	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
5.	Model C5-KWK	Tanda Terima Penyampaian Salinan Model C1-KWK dan lampirannya, serta Model C2-KWK kepada Saksi dan PPL.
6.	Model C6-KWK	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih.
7.	Model C7-KWK	Daftar Hadir Pemilih di TPS
8.	Model A3-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
9.	Model A4-KWK	Salinan Daftar Pemilih Pindahan (DPPH).
10.	Model A5-KWK	Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain.
11.	Model A.Tb1-KWK	Salinan Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1).
12.	Model A.Tb2-KWK	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) bagi pemilih yang memberikan hak pilih di TPS menggunakan KTP atau identitas kependudukan lainnya.

B. Surat suara yang digunakan, surat suara tidak digunakan, dan surat suara rusak/keliru coblos.

C. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf A, surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf serta alat kelengkapan TPS dan kelengkapan administrasi dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan tersegel untuk diteruskan kepada PPK sebagai bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan.

**YANG MENYERAHKAN,  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA**

**YANG MENERIMA,  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

.....  
Nama Lengkap

.....  
Nama Lengkap

\*) Coret yang tidak perlu;

**Keterangan :**

Formulir C4-KWK dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk arsip KPPS



MODEL  
C5-KWK

**TANDA TERIMA PENYAMPAIAN  
SERTIFIKAT HASIL DAN RINCIAN PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA DI TPS DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

TPS : Nomor .....

DESA / KELURAHAN \*) : .....

KECAMATAN : .....

KABUPATEN : BANJARNEGARA

PROVINSI : JAWA TENGAH

No	N a m a	Saksi Calon / PPL	Tanda tangan
1	.....	Nama Calon	.....
2	.....	Nama Calon	.....
3	.....	Nama Calon	.....
4	.....	PPL / Pengawas TPS	.....

.....  
**Yang Menyerahkan**  
**Ketua KPPS**

(.....)

**Keterangan :**

\*) Coret yang tidak perlu



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

MODEL  
C6-KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT: ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../...../.....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara:**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

*gunting disini*

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih : .....
(.....)	(.....)	No. DPT : .....
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima Tgl. ....



**SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH**

MODEL  
C6-KWK

Bersama ini diberitahukan bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT: ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal , : ...../...../.....  
Pukul : 07.00 s/d 13.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa/ Kelurahan .....  
Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara:**  
- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama calon

**KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA  
K E T U A**

(.....)

**Catatan :**

- Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.
- Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

*gunting disini*

Yang menyerahkan	Yang menerima	Nama Pemilih : .....
(.....)	(.....)	No. DPT : .....
Nama Jelas	Nama Jelas	Diterima Tgl. ....



**DAFTAR HADIR PEMILIH DI TPS  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
TAHUN 2017**

Nomor TPS : .....  
Kelurahan/Desa : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : BANJARNEGARA  
Provinsi : JAWA TENGAH

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	L.k	Pr	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
38						
39						
40						
41						
42						
43						
44						
45						
46						
47						
48						
49						
50						
51						
52						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103						
104						
105						
106						
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPTph	DPTb	Lk	Pr	
118						
119						
120						
121						
122						
123						
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136						
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148						
149						
150						
151						
152						
153						
154						
155						
156						
157						
Jumlah						

No	No Urut			DPTb	Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb		Lk	Pr	
158							
159							
160							
161							
162							
163							
164							
165							
166							
167							
168							
169							
170							
171							
172							
173							
174							
175							
176							
177							
178							
179							
180							
181							
182							
183							
184							
185							
186							
187							
188							
189							
190							
191							
192							
193							
194							
195							
196							
197							
Jumlah							

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	Dpph	DPTb	Lk	Pr	
198						
199						
200						
201						
202						
203						
204						
205						
206						
207						
208						
209						
210						
211						
212						
213						
214						
215						
216						
217						
218						
219						
220						
221						
222						
223						
224						
225						
226						
227						
228						
229						
230						
231						
232						
233						
234						
235						
236						
237						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
238						
239						
240						
241						
242						
243						
244						
245						
246						
247						
248						
249						
250						
251						
252						
253						
254						
255						
256						
257						
258						
259						
260						
261						
262						
263						
264						
265						
266						
267						
268						
269						
270						
271						
272						
273						
274						
275						
276						
277						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
278						
279						
280						
281						
282						
283						
284						
285						
286						
287						
288						
289						
290						
291						
292						
293						
294						
295						
296						
297						
298						
299						
300						
301						
302						
303						
304						
305						
306						
307						
308						
309						
310						
311						
312						
313						
314						
315						
316						
317						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
318						
319						
320						
321						
322						
323						
324						
325						
326						
327						
328						
329						
330						
331						
332						
333						
334						
335						
336						
337						
338						
339						
340						
341						
342						
343						
344						
345						
346						
347						
348						
349						
350						
351						
352						
353						
354						
355						
356						
357						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
358						
359						
360						
361						
362						
363						
364						
365						
366						
367						
368						
369						
370						
371						
372						
373						
374						
375						
376						
377						
378						
379						
380						
381						
382						
383						
384						
385						
386						
387						
388						
389						
390						
391						
392						
393						
394						
395						
396						
397						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin			Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk	Pr		
398							
399							
400							
401							
402							
403							
404							
405							
406							
407							
408							
409							
410							
411							
412							
413							
414							
415							
416							
417							
418							
419							
420							
421							
422							
423							
424							
425							
426							
427							
428							
429							
430							
431							
432							
433							
434							
435							
436							
437							
Jumlah							

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	L.k	Pr	
438						
439						
440						
441						
442						
443						
444						
445						
446						
447						
448						
449						
450						
451						
452						
453						
454						
455						
456						
457						
458						
459						
460						
461						
462						
463						
464						
465						
466						
467						
468						
469						
470						
471						
472						
473						
474						
475						
476						
477						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPI	DPPH	DPTb	Lk	Pr	
478						
479						
480						
481						
482						
483						
484						
485						
486						
487						
488						
489						
490						
491						
492						
493						
494						
495						
496						
497						
498						
499						
500						
501						
502						
503						
504						
505						
506						
507						
508						
509						
510						
511						
512						
513						
514						
515						
516						
517						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
518						
519						
520						
521						
522						
523						
524						
525						
526						
527						
528						
529						
530						
531						
532						
533						
534						
535						
536						
537						
538						
539						
540						
541						
542						
543						
544						
545						
546						
547						
548						
549						
550						
551						
552						
553						
554						
555						
556						
557						
Jumlah						

No	No Urut		Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPH	DPTb	Lk Pr	
558					
559					
560					
561					
562					
563					
564					
565					
566					
567					
568					
569					
570					
571					
572					
573					
574					
575					
576					
577					
578					
579					
580					
581					
582					
583					
584					
585					
586					
587					
588					
589					
590					
591					
592					
593					
594					
595					
596					
597					
Jumlah					

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPh	DPTb	Lk	Pr	
598						
599						
600						
601						
602						
603						
604						
605						
606						
607						
608						
609						
610						
611						
612						
613						
614						
615						
616						
617						
618						
619						
620						
621						
622						
623						
624						
625						
626						
627						
628						
629						
630						
631						
632						
633						
634						
635						
636						
637						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
638						
639						
640						
641						
642						
643						
644						
645						
646						
647						
648						
649						
650						
651						
652						
653						
654						
655						
656						
657						
658						
659						
660						
661						
662						
663						
664						
665						
666						
667						
668						
669						
670						
671						
672						
673						
674						
675						
676						
677						
Jumlah						

No	No Urut			DPTb	Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb		Lk	Pr	
678							
679							
680							
681							
682							
683							
684							
685							
686							
687							
688							
689							
690							
691							
692							
693							
694							
695							
696							
697							
698							
699							
700							
701							
702							
703							
704							
705							
706							
707							
708							
709							
710							
711							
712							
713							
714							
715							
716							
717							
Jumlah							

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
718						
719						
720						
721						
722						
723						
724						
725						
726						
727						
728						
729						
730						
731						
732						
733						
734						
735						
736						
737						
738						
739						
740						
741						
742						
743						
744						
745						
746						
747						
748						
749						
750						
751						
752						
753						
754						
755						
756						
757						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
758						
759						
760						
761						
762						
763						
764						
765						
766						
767						
768						
769						
770						
771						
772						
773						
774						
775						
776						
777						
778						
779						
780						
781						
782						
783						
784						
785						
786						
787						
788						
789						
790						
791						
792						
793						
794						
795						
796						
797						
Jumlah						

No	No Urut			Jenis Kelamin		Keterangan
	DPT	DPPh	DPTb	Lk	Pr	
798						
799						
800						
Jumlah						

Tanda Tangan  
Ketua KPPS

(.....)

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 15 September 2016

**KETUA**

ttd

**GUGUS RISDARYANTO**

Salinan sesuai dengan aslinya

